

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data dalam penelitian tentang konflik isu pemekaran wilayah di Provinsi Aceh pasca MoU Helsinki studi kasus konflik horizontal di Kabupaten Aceh Tengah, maka pada bab ini akan diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peristiwa munculnya ide pemekaran Provinsi ALA dalam Provinsi itu timbul karena adanya ketidakadilan dan kesenjangan dalam pembangunan di Aceh. Sehingga ada beberapa Kabupaten yang termarginalkan dari pembangunan selain itu etnis minoritas kurang diberikan kesempatan ruang untuk mengekspresikan diri baik secara politik, ekonomi, maupun budaya, seperti halnya wilayah ALA yang mayoritasnya suku Gayo yang merasa di anak tirikan atau dinomor dua kan (Pembangunan yang tidak merata dan Definisi ACEH: Karakternya, Sifatnya, Ciri-cirinya. Eksistensi Kultural yang diabaikan (hijack tarian saman Gayo dan kerawang Gayo) dan penolakan *Qanun Wali Nanggroe* (QWN) yang dianggap sebagai diskriminatif terhadap suku lain di ALA dan juga penolakan *Qanun* bendera di ALA menjadi penyebab muncul konflik horizontal antara masyarakat yang pro dan kontra yang menurut John Galtung dalam teori segitiga konflik nya bahwa sikap dan perilaku tersebut telah menyebabkan kontradiksi yaitu masyarakat/Kelompok Pro Pembentukan Provinsi ALA (KP3) ALA menuntut pemekaran yang terhambat persetujuan DPRA dan Pemerintah Aceh yang terganjal MoU

2. Karakteristik pihak yang pro dan kontra dalam pemekaran ALA di Kabupaten Aceh Tengah yang membedakannya ialah dari suku bangsa dan pendidikan. Pihak yang pro yaitu bersuku bangsa Gayo, Jawa dan Batak yang berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah dan memiliki jenjang pendidikan menengah ke atas, pihak yang kontra yaitu pada umumnya bersuku bangsa Aceh dan beberapa pihak yang kontra yang bersuku bangsa Gayo belum mengetahui maksud dan tujuan pemekaran itu akibat pendidikan yang rendah.
3. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik horizontal adalah masyarakat pro yang beraliansi dengan kelompok Pro Pembentukan Provinsi (KP3) ALA yang mendapat dukungan dari DPRK dan PDIP dengan masyarakat kontra.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka yang dapat dikemukakan sebagai saran adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Aceh harus lebih banyak mendengarkan keluhan permasalahan kesejahteraan yang terjadi di daerah-daerah serta harus lebih memperhatikan kondisi ALA dan etnis minoritas diberikan kesempatan ruang untuk mengekspresikan diri baik secara politik, ekonomi, maupun budaya, kedepannya untuk menghindari konflik yang berujung kekerasan yang bersifat vertikal maupun horizontal
2. Tim pengagas pemekaran harus lebih serius melaksanakan lobi-lobi politik ke stakeholders terkait, dan meningkatkan sosialisasi kebijakan pemekaran kemasyarakat, sehingga akan meningkatnya simpatisan yang mendukung pemekaran dan hilangnya stigma “elitis” dalam kebijakan pemekaran yang didengungkan